

2021

Determinan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Formal

Ardi Hasiholan

Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, ardihasiholan@gmail.com

Prijono Tjiptoherijanto

Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, prijojth@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jke>



Part of the [Economics Commons](#), [Public Affairs](#), [Public Policy and Public Administration Commons](#), and the [Urban Studies and Planning Commons](#)

Recommended Citation

Hasiholan, Ardi and Tjiptoherijanto, Prijono (2021) "Determinan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Formal," *Jurnal Kebijakan Ekonomi*: Vol. 16: Iss. 2, Article 5.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss2/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Kebijakan Ekonomi by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Determinan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Formal

Ardi Hasiholan^{a*}, & Prijono Tjiptoherijanto^a

^aMagister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Indonesia
ardihasiholan@gmail.com

Abstract

Social security is functioned as a basic protection system for the community against the possibility of socio-economic risks that will arise in the future. One of the social security that is used as protection from the risks that society may face in the future is employment social security. The government encourages to increase the number of people who are protected by employment social security. This study aims to look at the determinants of the factors that affect employment social security participation specifically in the formal sector. By using the random effects model method and panel data consisting of five factors as independent variables from 123 branch offices, the researcher will examine what factors influence the participation of formal sector social security which is divided into two equations. More specific research was also conducted based on the branch office class category which was divided into three namely the main branch office class, the middle branch office class, and the pratama branch office class.

Keywords: Labor Social Security; Supervision and Examination; Services; Panel Data.

Abstrak

Jaminan sosial berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya resiko sosial ekonomi yang akan muncul di masa depan. Salah satu jaminan sosial yang digunakan sebagai perlindungan dari resiko yang mungkin dihadapi masyarakat di masa depan yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah mendorong upaya untuk semakin besarnya masyarakat yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan (penentu) faktor-faktor yang mempengaruhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara khusus pada sektor formal. Dengan menggunakan metode random effect model dan data panel yang terdiri dari lima faktor sebagai variabel bebas dari 123 kantor cabang, peneliti akan meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepesertaan jaminan sosial sektor formal yang terbagi menjadi dua model persamaan. Dilakukan juga penelitian secara lebih spesifik berdasarkan kategori kelas kantor cabang yang terbagi menjadi tiga yaitu kelas kantor cabang utama, kelas kantor cabang madya, dan kelas kantor cabang pratama.

Kata kunci: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Pengawasan dan Pemeriksaan; Layanan; Data Panel.

PENDAHULUAN

Sistem jaminan sosial merupakan salah satu program yang digunakan oleh negara untuk memenuhi sekurang-kurangnya beberapa kebutuhan dasar masyarakat. Lebih dari 164 negara yang bergabung menjadi anggota Internasional Labor Organization (ILO) memiliki setidaknya satu program jaminan sosial. Perlindungan jaminan sosial berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya

resiko sosial ekonomi yang akan muncul di masa depan.

Di Indonesia menurut Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional Tahun 2004, jaminan sosial ialah suatu bentuk perlindungan atas resiko sosial yang diselenggarakan oleh negara sebagai bagian memberikan jaminan agar seluruh masyarakat dapat memenuhi standar hidup layak sebagai salah satu kebutuhan dasarnya. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemanusiaan yang berasaskan pada

*alamat Korespondensi : ardihasiholan@gmail.com

kebermanfaatan, dan asas berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat. SJSN diharapkan dapat memberikan jaminan atas resiko di masa depan sehingga pemenuhan standar hidup layak dapat terpenuhi bagi tenaga kerja beserta keluarganya.

Jaminan sosial sendiri bertujuan untuk memberikan jaminan kemandirian atas risiko sosial yang mungkin timbul di kemudian hari atas resiko terjadinya kehilangan atau resiko berkurangnya pendapatan yang mungkin terjadi oleh seorang pekerja. Tujuan program jaminan sosial adalah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, nyatanya berdampak ekonomi sangat besar (Sulastomo, 2011). Jaminan sosial baik dalam bentuk jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan adalah hak setiap tenaga kerja selain gaji atau upah. Para pekerja berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meminimalkan resiko yang mungkin timbul di masa depan seperti kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja maupun kematian yang ditimbulkan saat bekerja maupun yang ditimbulkan akibat bekerja.

Selain manfaat bagi para pekerja dalam meminimalkan resiko, jaminan sosial ketenagakerjaan juga membantu pemberi kerja dalam hal ini perusahaan untuk meminimalkan resiko biaya yang harus dikeluarkan bila terjadi resiko kecelakaan kerja ataupun kematian pada pekerja. Bila terjadi resiko kecelakaan kerja yang terjadi pada para pekerja, maka jaminan sosial ketenagakerjaan menjamin dalam hal memberikan pengobatan ataupun santunan bagi pekerja maupun keluarga pekerja. Selain itu juga ada program tabungan hari tua yang merupakan bagian dari program jaminan

sosial ketenagakerjaan yang dapat meringankan baik pemberi kerja untuk memberikan santunan ataupun pesangon diluar yang diwajibkan oleh peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang merupakan suatu Badan yang ditugaskan untuk mengelola sistem jaminan sosial ketenagakerjaan untuk para pekerja Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan dahulu saat masih bernama PT. Jamsostek memiliki 4 program perlindungan sosial ketenagakerjaan yaitu jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).

Namun seiring dengan mulai berlakunya penerapan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai Badan/Lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia dimana BPJS dibagi menjadi dua jaminan BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk masyarakat Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja Indonesia, maka mulai tahun 2014 program JKN tidak lagi diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan diserahkan kepada BPJS Kesehatan berwenang dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Selama tahun 2014 sampai pertengahan tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan hanya menyelenggarakan 3 program yaitu program JHT, JKK, dan JKJ. Pada tanggal 1 Juli 2015, BPJS

Ketenagakerjaan mendapat amanah untuk menyelenggarakan 1 program baru yaitu jaminan pensiun (JP), sehingga total program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sejak 2015 sebanyak 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberi dampak perlindungan jaminan sosial bagi pekerja maupun keluarganya di masa depan dan juga menjadi sarana edukasi dan brand awareness sehingga mendorong pertumbuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dapat mendorong universal coverage dalam perlindungan masyarakat pekerja di Indonesia. Latar belakang inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mendorong kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara khusus pada sektor formal.

TINJAUAN LITERATUR

Suratman dan Junaidi (2019) mengatakan dalam analisa sistem pengawasan asuransi secara khusus asuransi syariah dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah bertolak dari ketentuan hukum Islam dalam aspek ekonomi syariah. Konsep asuransi syariah menggunakan berbagai risiko yang berbeda dengan konsepsi asuransi konvensional. Banyak kendala dalam melakukan pengawasan asuransi syariah diantaranya soal pemahaman masyarakat. Kendala lainnya yaitu dukungan pemerintah

adalah upaya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang masih menjadi hambatan.

Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan penguatan struktur. Struktur yang ada saat ini sudah baik, tetapi karena DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) menghadapi tugas dan tantangan yang lebih berat seperti mengurus dan bermitra dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang banyak diurus oleh praktisi yang professional. Selain itu, perlu praktek langsung yang memungkinkan sistem pengawasan berjalan maksimal dengan melakukan evaluasi pengawasan kelembagaan secara keberlanjutan sehingga memungkinkan sistem pengawasan pada lembaga asuransi syariah dapat berjalan maksimal.

Thariq, Sukirno, dan Prananingtyas (2020) melakukan penelitian tentang pengawasan asuransi jiwa syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat. Dimana OJK melakukan pengawasan dalam pengelolaan asuransi Jiwasraya di Kota Padang dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis di Kota Padang, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung melalui tugas dan pemeriksaan berkoordinasi dengan Kantor Pusat Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini kantor pusat Asuransi Jiwasraya di Jakarta. Fungsi pengawasan secara langsung melalui tugas pengawasan dan pemeriksaan berkoordinasi dengan kantor pusat Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini kantor pusat Asuransi Jiwasraya. Otoritas Jasa Keuangan dilakukan pengawasan secara tidak langsung melalui tugas, pengaturan, dimana Otoritas Jasa

Keuangan memberikan pengaturan terhadap hal tertentu melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengimplementasian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan Konsumen disektor Jasa Keuangan.

Sedangkan pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan sendiri dilakukan baik secara internal maupun eksternal dalam pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan. Dimana pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Sedangkan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh lembaga negara lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan akuntan publik.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri memiliki aturan dalam hal pengawasan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam aturan ini, petugas pemeriksa adalah pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian khusus di bidang jaminan sosial dan memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Augustin (2017) dalam studinya yang meneliti tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku menabung untuk hari tua bagi pekerja di Indonesia ataupun di Inggris. Faktor-faktor yang menjadi variabel penelitian antara lain variabel demografis yang terdiri dari usia, pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, dan negara. variabel lainnya yaitu variabel psikologi yang terdiri dari time perspective, goal clarity, dan literasi keuangan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasilnya yaitu faktor literasi keuangan dan goal Clarity (Tujuan) seseorang di masa tua menjadi faktor yang sangat penting untuk orang tersebut menabung lebih banyak untuk masa tuanya.

Gultom (2016) menyatakan bahwa perkembangan makro berpengaruh terhadap peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan kenaikan 1% produk domestik bruto akan berdampak pada pertumbuhan kepesertaan sebesar 0,0344%.

Madigma (2016) menyatakan cakupan jaminan sosial di Filipina secara positif dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi maupun faktor non-ekonomi. Adapun variabel terikat dalam penelitiannya yaitu cakupan kepesertaan jaminan sosial terhadap angkatan kerja aktif dan cakupan kepesertaan jaminan sosial terhadap penduduk dengan usia 60 tahun keatas.

Variabel ekonomi dalam penelitian ini yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pertumbuhan pembentukan modal terhadap harga konstan tahun 2000, tingkat stabilitas ekonomi, tingkat modernisasi, tingkat pertumbuhan upah, tingkat kapasitas administratif nasional, tingkat pengangguran,

tingkat globalisasi, tingkat urbanisasi, jumlah pekerja tidak penuh, serta dummy krisis ekonomi global. Sedangkan variabel non ekonominya yaitu tingkat persentase manfaat jaminan sosial terhadap PDB, jumlah penduduk yang bukan termasuk angkatan kerja, persentase sektor informal, persentase jumlah pekerja wanita, tingkat pendidikan sekunder, tingkat kemiskinan per populasi, dan jumlah peserta serikat pekerja.

ekonomi yaitu stabilitas ekonomi/tingkat inflasi, modal kerja, dan tabungan. Sedangkan Variabel bebas berdasarkan faktor non-ekonomi yaitu sektor informal serta tingkat kemiskinan. Data penelitian dilakukan berdasarkan 34 provinsi (i) di Indonesia dengan waktu penelitian selama 5 tahun (t).

Hasil penelitian Panggabean (2019) diperoleh hasil koefisien determinasi (R² Test) yang kuat pada persamaan cakupan

Tabel 4.1. Model Persamaan Penelitian

No.	Persamaan
1	<p>Persamaan (4.1)</p> $jkk_jkm(it) = \beta_0 + \beta_1.pengawas(it) + \beta_2.realisasi_piutang(it) + \beta_3.klaim_jkk(it-1) + \beta_4.klaim_jkm(it-1) + \varepsilon$
2	<p>Persamaan (4.2)</p> $jht(it) = \beta_0 + \beta_1.pengawas(it) + \beta_2.realisasi_piutang(it) + \beta_3.klaim_jht(it-1) + \beta_4.klaim_jkk(it-1) + \beta_5.klaim_jkm(it-1) + \varepsilon$

Ket: i merujuk pada cabang dan t merujuk pada waktu (2016-2019)

Dalam kesimpulan penelitian Mandigma (2016) menyebutkan faktor yang berdampak positif antara lain stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan pembentukan modal, pertumbuhan upah dan urbanisasi, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan globalisasi berpengaruh secara negatif. Sedangkan pada faktor non-ekonomi, diperoleh hasil negatif terhadap cakupan jaminan sosial oleh penduduk lanjut usia dipengaruhi oleh teori feminisme, pendidikan dan tingkat kemiskinan, termasuk sektor informal.

Panggabean (2019) melakukan penelitian mengenai model kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia dalam dinamika pertumbuhan cakupan kepesertaan diperoleh hasil bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Variabel bebas pada penelitiannya terbagi dua berdasarkan faktor ekonomi dan non-ekonomi. Variabel bebas berdasarkan faktor

kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor penerima upah tanpa jasa konstruksi dan sektor penerima upah dengan jasa konstruksi, masing-masing bernilai 67,64% dan 46,22%. Sedangkan model kepesertaan pada cakupan sektor bukan penerima upah dan cakupan kepesertaan untuk peserta dengan usia pensiun memiliki koefisien determinasi yang rendah, masing-masing bernilai 2,19% dan 1,58%.

Berdasarkan penjelasan beberapa literatur ataupun penelitian sebelumnya yang membahas perihal faktor-faktor yang bersifat makro ekonomi dalam keterhubungan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melihat determinan faktor-faktor yang mendorong kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal di Indonesia berdasarkan variabel-variabel mikro yang ada pada Badan/Lembaga yang ditunjuk negara dalam

menyelenggarakan jaminan sosial persamaan penelitian yang akan penulis ketenagakerjaan. lakukan seperti yang terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.2 . Observasi Data Model Persamaan 4.1

Variabel	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non JHT (JKK_JKM) (n = 123)			
	Mean	Std. Dev.	Min	Max
<i>jkk_jkm</i>	22,022.88	24,306.76	0	180,627
<i>pengawas</i>	1.24	0.49	0	3
<i>realisasi_piutang</i>	111.8	108.61	0	1,131.40
<i>klaim_jkk</i>	6,033,968,115.17	7,179,256,835.32	0	50,673,710,722.12
<i>klaim_jkm</i>	181,569,918.69	312,896,467.05	0	2,652,000,000

METODE

Hipotesis pada penelitian ini adalah peningkatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan baik dalam jumlah petugas pengawasan dan pemeriksanaa maupun realisasi piutang terhadap potensi piutang yang menjadi proxy dari ketaatan perusahaan sehingga meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hipotesis lainnya dalam penelitian ini yaitu manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dapat mendorong pertumbuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pencapaian di tahun yang akan datang.

Dalam penelitian ini juga akan dilakukan penelitian berdasarkan subsampel kategori kelas cabang untuk mengetahui bagaimana manfaat program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan mendorong peningkatan kepesertaan di masing-masing kategori kelas cabangnya. Adapun kategori kelas cabang di BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari tiga kategori yaitu kelas cabang utama, kelas cabang madya, dan kelas cabang pratama. Berikut ini spesifikasi model

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari BPJS Ketenagakerkerjaan. Pengumpulan data sekunder dilakukan berdasarkan teori maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal dimana data tersebut terbagi menjadi dua jenis antara lain kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal non program JHT dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal dengan program JHT. Terbaginya dua jenis kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal ini karena masih cukup banyak perusahaan yang mendaftarkan pesertanya tanpa mengikutkan program JHT, sehingga tenaga kerja hanya mengikuti dua program yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 109 Tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial dijelaskan bahwa pemberi kerja dengan skala usaha mikro diwajibkan mengikuti program JKK dan

program JKM paling lambat 1 Juli 2015 dan kemudian secara bertahap dimulainya pendaftaran program JHT dan Jaminan Pensiun (JP) paling lambat tahun 2029. Hal inilah yang mendasari terbagi menjadi dua kelompok kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal (Penerima Upah). Adapun periode yang digunakan yaitu pada tahun 2016 hingga 2019 dari 123 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

Selanjutnya yaitu data jumlah petugas pengawas dan pemeriksa (wasrik) dari 123

mendorong peningkatan jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal di tahun selanjutnya.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terstruktur dalam bentuk data panel yang seimbang terdiri dari n sebanyak 123 kantor cabang dan t selama 4 tahun (2016-2019) sehingga n*t menghasilkan 492 data observasi. Data observasi pada penelitian ini terbagi menjadi dua tabel dikarenakan adanya dua persamaan model yang akan diteliti yaitu kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal non JHT dan kepesertaan

Tabel 4.3. Observasi Data Model Persamaan 4.2

Variabel	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan JHT (n = 123)			
	Mean	Std. Dev.	Min	Max
<i>jht</i>	120,745.1	101,522.4	0	653,241
<i>pengawas</i>	1.24	0.49	0	3
<i>realisasi_piutang</i>	111.80	108.61	0	1,131.40
<i>klaim_jht</i>	126,232,225,471.16	131,380,269,274.94	0	938,358,898,458
<i>klaim_jkk</i>	6,033,968,115.17	7,179,256,835.32	0	50,673,710,722.12
<i>klaim_jkm</i>	181,569,918.69	312,896,467.05	0	2,652,000,000

kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia dengan periode waktu 2016-2019. Kemudian ada data rasio capaian penagihan piutang terhadap potensi piutang setiap tahunnya yang hasilnya berupa skala persentase.

Tiga data selanjutnya yaitu jumlah pembayaran klaim JHT, jumlah pembayaran klaim JKK dan jumlah pembayaran klaim JKM di 123 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan seluruh Indonesia dalam periode waktu 2015-2018. Pengambilan periode waktu untuk data pembayaran klaim program jaminan ini dikarenakan penulis ingin melihat apakah terdapat korelasi positif yang ditimbulkan dari pembayaran klaim tahun sebelumnya yang

jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal JHT. Adapun observasi data dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

HASIL

Dilakukan analisis regresi data panel pada dua model persamaan yaitu kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal non jaminan hari tua (JHT) dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal dengan JHT dari 123 kantor cabang dengan data yang digunakan pada tahun 2016-2019. Dan akan dilakukan juga analisis regresi data panel berdasarkan sub sampel kategori kelas kantor cabang yang terbagi menjadi tiga

yaitu, kelas utama, kelas madya, dan kelas pratama.

Setelah melakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik, selanjutnya dilakukan regresi data panel terhadap persamaan model yang akan diteliti. Seperti yang terlihat pada Tabel 5.3 untuk persamaan (4.1) diperoleh hasil R

42,72%. Sisanya berada di variabel lain diluar variabel penelitian.

Semua variabel bebas pada persamaan (4.1) signifikan terhadap variabel terikat yaitu kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal non JHT (Jaminan Hari Tua) dengan signifikansi alpha 1%. Variabel petugas

Tabel 5.3. Hasil Pengujian Model Persamaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Formal Non JHT

Variabel	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Formal Non JHT	
	Model 1 (Fixed Effect)	Model 2 (Random Effect)
<i>lnPengawas</i>	61.85***	50.69***
<i>lnrealisasi_piutang</i>	2.634***	2.454***
<i>lnklaim_jkk</i>	0.000797***	0.000559***
<i>lnklaim_jkm</i>	0.00177***	0.00281***
<i>n</i>	123	123
<i>t</i>	4	4
<i>N</i>	492	492
<i>r2</i>	0.3690	0.4272

standard errors in bracket *p<0,10; ** p<0,05; *** p<0,01

squared sebesar 0,4272 sehingga disimpulkan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan

pengawas signifikan dengan koefisien sebesar 50.69228. Kemudian ada variabel realisasi

Tabel 5.4. Hasil Pengujian Model Persamaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Formal dengan JHT

Variabel	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Formal dengan JHT	
	Model 1 (Fixed Effect)	Model 2 (Random Effect)
<i>lnpengawas</i>	40.06***	44.32***
<i>lnrealisasi_piutang</i>	0.426	0.110
<i>lnklaim_jht</i>	0.0000185	0.0000632*
<i>lnklaim_jkk</i>	0.0000863	0.000131
<i>lnklaim_jkm</i>	0.000281	-0.000240
<i>n</i>	123	123
<i>t</i>	4	4
<i>N</i>	492	492
<i>r2</i>	0.3267	0.4941

standard errors in bracket *p<0,10; ** p<0,05; *** p<0,01

(mempengaruhi) variabel terikat sebesar

piutang yang signifikan dengan koefisien

sebesar 2.453724, variabel pembayaran klaim JKK t-1 dengan koefisien sebesar 0.0005587, dan variabel pembayaran klaim JKM t-1 dengan koefisien sebesar 0.0028121. Hasil ini mencerminkan semua variabel bebas berpengaruh dalam meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal Non JHT.

Sedangkan hasil uji regresi data panel untuk

Selanjutnya akan dilakukan regresi data panel berdasarkan subsampel kategori kelas cabang. Dari 123 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan setelah dikategorikan menjadi kelas cabang menjadi 31 kategori kelas cabang utama, 39 kategori kelas cabang madya, dan 53 kategori kelas cabang pratama.

Pada Tabel 5.5 diperoleh hasil subsampel pada cabang utama dengan menggunakan

Tabel 5.5. Hasil Regresi Model Subsampel Kepesertaan Jaminan Sosial Kepesertaan Sektor Formal Non JHT

Variabel	Model Persamaan 4.1 : Kepesertaan Jaminan Sosial Kepesertaan Non JHT		
	<i>jkk_jkm</i>	<i>jkk_jkm</i>	<i>jkk_jkm</i>
	Cabang Utama	Cabang Madya	Cabang Pratama
<i>pengawas</i>	100.6***	38.54	33.84
<i>realisasi_piutang</i>	1.877	1.567	2.999***
<i>klaim_jkk</i>	0.000649***	0.000869***	0.000724***
<i>klaim_jkm</i>	0.00174*	0.00195**	0.00223***
<i>n</i>	31	39	53
<i>t</i>	4	4	4
<i>N</i>	124	156	212
<i>R-Squared</i>	0,5049	0,2998	0,3306
<i>Metode</i>	Random Effect	Fixed Effect	Fixed Effect
standard errors in bracket *p<0,10; ** p<0,05; *** p<0,01			

persamaan (4.2) untuk melihat determinan faktor-faktor yang mendorong kepesertaan jaminan sosial sektor formal dengan JHT diperoleh hasil R squared sebesar 0,4941 sehingga disimpulkan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan (mempengaruhi) variabel terikat sebesar 49,41%.

Variabel bebas yang signifikan terhadap variabel terikat pada persamaan model (4.2) yaitu variabel petugas pengawas dengan koefisien sebesar 44,32. Sedangkan variabel realisasi piutang, pembayaran klaim JHT, pembayaran klaim JKK dan pembayaran klaim JKM belum berpengaruh terhadap kepesertaan jaminan sosial sektor formal dengan JHT.

metode "random effect model" dihasilkan R Squared sebesar 0,5049. Terdapat 3 variabel bebas yang signifikan yaitu variabel petugas pengawas dengan koefisien 100,6, pembayaran klaim JKK dengan koefisien 0,000649, dan pembayaran klaim JKM yang signifikan dengan koefisien 0,00174 terhadap pertumbuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal non JHT.

Sedangkan pada subsampel cabang madya dengan menggunakan "fixed effect model" dihasilkan dihasilkan R Squared sebesar 0,2998 dan terdapat dua variabel bebas yang signifikan yaitu variabel pembayaran klaim JKK dengan koefisien 0,000869 dan pembayaran klaim JKM dengan koefisien

0,00195 terhadap pertumbuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal non JHT.

Dan pada subsampel cabang pratama dengan menggunakan "fixed effect model" dihasilkan dihasilkan R Squared sebesar 0,3306 dan terdapat tiga variabel bebas yang signifikan yaitu variabel realisasi piutang dengan koefisien 2,999 , pembayaran klaim JKK dengan koefisien 0,000724 dan pembayaran klaim JKM dengan koefisien 0,00223 terhadap pertumbuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal non JHT.

Hasil ini menggambarkan bagaimana fungsi masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh yang berbeda jika dilihat berdasarkan kategori kelas cabang. Dimana variabel personil wasrik berkorelasi positif di cabang utama sejalan dengan mayoritas jumlah petugas pengawas yang jauh lebih banyak di cabang utama dibandingkan di

melakukan penagihan capaian piutang terhadap potensi piutang belum berkorelasi positif seperti yang terlihat dalam analisis deskriptif capaian piutang yang tingkat capaiannya naik-turun setiap tahunnya, sehingga pada hasil regresi terlihat hanya capaian_piutang di kantor cabang madya yang berkorelasi positif.

Sedangkan untuk variabel pembayaran klaim JKK dan pembayaran klaim JKM berkorelasi positif dalam mendukung kepesertaan jaminan sosial sektor formal non JHT di semua kategori kantor cabang. Pada penelitian ini terlihat nilai R Squared tergolong rendah, hal ini disebabkan penelitian berdasarkan subsampel kategori kelas cabang sehingga jumlah data observasi menjadi lebih sedikit. Perlu spesifikasi data observasi serta penambahan jumlah variabel yang diteliti yang nantinya akan berdampak pada nilai R Squared yang jauh lebih besar untuk penelitian subsampel.

Tabel 5.6. Hasil Regresi Model Subsampel Kepesertaan Jaminan Sosial Kepesertaan Sektor Formal dengan JHT

Variabel	<i>Model Persamaan 4.2 : Kepesertaan Jaminan Sosial Kepesertaan dengan JHT</i>		
	<i>jht</i>	<i>jht</i>	<i>jht</i>
	<i>Cabang Utama</i>	<i>Cabang Madya</i>	<i>Cabang Pratama</i>
<i>pengawas</i>	7594.7***	9721.7***	80.18***
<i>realisasi_piutang</i>	-6.671	9.929	0.733
<i>klaim_jht</i>	0.000000349**	0.000000721***	0.0000134
<i>klaim_jkk</i>	7.35E-08	0.000000345	0.000664***
<i>klaim_jkm</i>	0.0000134*	-0.000000622	-0.000522
<i>Metode</i>	<i>Random Effect</i>	<i>Random Effect</i>	<i>Random Effect</i>
<i>n</i>	31	39	53
<i>t</i>	4	4	4
<i>N</i>	124	156	212
<i>R-Squared</i>	0,1368	0,1573	0,3654

standard errors in bracket *p<0,10; ** p<0,05; *** p<0,01

cabang madya dan pratama. Namun banyaknya jumlah personil wasrik dalam

Dilakukan juga regresi data panel berdasarkan subsampel kategori kelas cabang

padake pesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal dengan JHT terhadap 123 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari 31 kategori kelas cabang utama, 39 kategori kelas cabang madya, dan 53 kategori kelas cabang pratama.

Pada Tabel 5.6 diperoleh hasil subsampel pada cabang utama dengan menggunakan metode "random effect model" dihasilkan R Squared sebesar 0,1368 dan terdapat 3 variabel bebas yang signifikan yaitu variabel petugas pengawas dengan koefisien 7594,7, pembayaran klaim JHT dengan koefisien 0,000000349 dan pembayaran klaim JKM dengan koefisien 0,0000134 yang signifikan terhadap pertumbuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal dengan JHT.

Sedangkan pada subsampel cabang madya dengan menggunakan metode "random effect model" diperoleh R Squared sebesar 0,1573 dan terdapat dihasilkan 2 variabel bebas yang signifikan yaitu variabel petugas pengawas dengan koefisien 9721,7 dan pembayaran klaim JHT dengan koefisien 0,000000721 terhadap pertumbuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal dengan JHT.

Dan pada subsampel cabang pratama dengan menggunakan "random effect model" diperoleh R Squared sebesar 0,3654 dan terdapat 2 variabel bebas yang signifikan yaitu variabel petugas pengawas dengan koefisien 80,18 dan pembayaran klaim JKK dengan koefisien 0,000664 terhadap pertumbuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal dengan JHT.

Hasil ini menggambarkan fungsi petugas pengawas di semua kategori kantor cabang dalam mendorong kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal dengan JHT. Namun, kinerja realisasi piutang terhadap potensi piutang di semua kategori kantor cabang belum berkorelasi positif, sejalan dengan analisis deskriptif dari variabel realisasi piutang yang belum berjalan baik dalam mendorong peningkatan kepesertaan.

Pada variabel pembayaran klaim, untuk kategori cabang utama pembayaran klaim JHT dan pembayaran klaim JKM berkorelasi positif mendorong kepesertaan jaminan sosial sektor formal dengan JHT. Sedangkan untuk kantor cabang madya, hanya pembayaran klaim JHT yang berkorelasi positif. Terakhir untuk kategori kantor cabang pratama hanya pembayaran klaim JKK yang berkorelasi positif dalam mendorong kepesertaan jaminan sosial sektor formal dengan JHT. Hal ini menggambarkan untuk faktor-faktor yang mendorong kepesertaan jaminan sosial sektor formal dengan JHT berbeda untuk setiap kategori kelas cabang.

Pada penelitian ini terlihat nilai R Squared tergolong rendah, hal ini disebabkan penelitian berdasarkan subsampel kategori kelas cabang sehingga jumlah data observasi menjadi lebih sedikit. Perlu spesifikasi data observasi serta penambahan jumlah variabel yang diteliti yang nantinya akan berdampak pada nilai R Squared yang jauh lebih besar untuk penelitian subsampel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diberikan beberapa kesimpulan antara lain: *Pertama*, penelitian

ini melakukan pengujian terhadap dua persamaan dengan hasil koefisien determinasi (R Squared) sebesar 42,72% pada persamaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal non jaminan hari tua (JHT) dan 49,41% pada persamaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal dengan JHT.

Kedua, dari hasil penelitian pada dua model persamaan yaitu persamaan (4.1) dan persamaan (4.2), variabel bebas petugas pengawas merupakan variabel yang menjadi faktor paling menentukan yang berdampak signifikan ke semua model persamaan. Hal ini menjelaskan bahwa faktor yang paling determinan dalam mendorong kenaikan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal dengan setiap Kenaikan persentase variabel jumlah petugas pengawas dan pemeriksa sebanyak 1% mendorong kenaikan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal non JHT hingga 50% dan Kenaikan persentase 1% variabel petugas pengawas mendorong kenaikan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal dengan JHT sebesar 44.3%. Besarnya koefisien ini menunjukkan bahwa variabel pengawas berperan besar dalam mendorong perusahaan (pemberi kerja) agar patuh menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal. variabel realisasi piutang berpengaruh hanya dalam persamaan (4.1) dimana kenaikan persentase 1%.

Ketiga, variabel realisasi piutang mendorong kenaikan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal non JHT sebesar 2,45%. Nilai besaran koefisien ini menunjukkan bahwa variabel realisasi piutang

terhadap potensi piutang iuran berperan besar dalam mendorong perusahaan (pemberi kerja) agar patuh menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal.

Keempat, variabel pembayaran klaim yang memiliki korelasi positif (signifikan) hanya dalam persamaan (4.1). Dimana variabel bebas pembayaran klaim yang digunakan yaitu variabel pembayaran JKK dan variabel pembayaran JKM. Kenaikan persentase 1% variabel pembayaran klaim JKK t-1 mendorong kenaikan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal non JHT sebesar 0,0005% dan kenaikan persentase 1% variabel pembayaran klaim JKM t-1 mendorong kenaikan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal non JHT sebesar 0,0028%. Namun, nilai koefisien untuk variabel manfaat pembayaran klaim tergolong kecil dampaknya terhadap kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal, hal ini menunjukkan bahwa benar manfaat terbesar dari keikutsertaan jaminan sosial ketenagakerjaan diperoleh oleh tenaga kerja bukan perusahaan (pemberi kerja) sedangkan perusahaan membayarkan premi iuran jauh lebih besar dari tenaga kerja.

Kelima, pada pengujian dengan subsampel kategori kelas cabang berdasarkan persamaan dengan variabel terikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal non JHT yaitu: (a), dengan determinan koefisien (R Squared) sebesar 50,49% diperoleh hasil variabel yang signifikan terhadap kepesertaan di kantor cabang utama yaitu variabel pengawas dengan koefisien sebesar 100,6 dan variabel pembayaran klaim JKK dengan koefisien sebesar 0,000649.

(b), dengan determinan koefisien (R Squared) sebesar 29,98% diperoleh hasil variabel yang signifikan terhadap kepesertaan di kantor cabang madya yaitu variabel pembayaran klaim JKK dengan koefisien sebesar 0,000869 dan variabel pembayaran klaim JKM dengan koefisien sebesar 0,00195.

(c), dengan determinan koefisien (R Squared) sebesar 33,06% diperoleh hasil variabel yang signifikan terhadap kepesertaan di kantor cabang pratama yaitu variabel realisasi piutang dengan koefisien sebesar 2,999 , variabel pembayaran klaim JKK dengan koefisien sebesar 0,000724 dan variabel pembayaran klaim JKM dengan koefisien sebesar 0,00223.

Keenam, pada pengujian dengan subsampel kategori kelas cabang berdasarkan persamaan dengan variabel terikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal dengan JHT yaitu : (a), dengan determinan koefisien (R Squared) sebesar 13,68% diperoleh hasil variabel yang signifikan terhadap kepesertaan di kantor cabang utama yaitu variabel pengawas dengan koefisien sebesar 7594,7 dan variabel pembayaran klaim JHT dengan koefisien sebesar 0,0000000349.

(b), dengan determinan koefisien (R Squared) sebesar 15,73% diperoleh hasil variabel yang signifikan terhadap kepesertaan di kantor cabang madya yaitu variabel pengawas dengan koefisien sebesar 9721,7 dan variabel pembayaran klaim JHT dengan koefisien sebesar 0,0000000721.

(c), dengan determinan koefisien (R Squared) sebesar 36,54% diperoleh hasil variabel yang signifikan terhadap kepesertaan di kantor cabang pratama yaitu variabel

pengawas dengan koefisien sebesar 80,18 dan variabel pembayaran klaim JKK dengan koefisien sebesar 0,000664.(7), nilai koefisien R Squared pada penelitian subsampel berdasarkan kategori kelas cabang masih terlalu kecil disebabkan oleh observasi data yang menjadi lebih sedikit dikarenakan data observasi dibagi tiga menjadi kategori kelas cabang utama, kelas cabang madya, dan kelas cabang pratama.

SARAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diberikan beberapa rekomendasi yaitu:

Pertama, berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini variabel pengawas adalah faktor yang menjadi penentu (determinan) dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal non jaminan hari tua (JHT) maupun kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal dengan JHT. Hal ini menjadi gambaran bagaimana peran adanya pengawas dalam tugasnya menegakkan aturan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jika tidak ada pengawas maka cenderung perusahaan tidak mau berpartisipasi menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dikarenakan perusahaan yang mengeluarkan biaya (cost) yang cukup besar sementara manfaat terbesar hanya diterima oleh karyawan. Oleh karena itu penambahan jumlah petugas pengawas di setiap kantor cabang hingga optimalisasi peran dan fungsinya diperlukan karena terbukti dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam

mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kedua, pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan masih terbatas pada faktor pengawasan dan manfaat dari pembayaran klaim jaminan. Hal ini dikarenakan keterbatasan data pada fokus penelitian penulis. Faktor petugas pengawas dan fungsinya hanya ada di kantor cabang induk yang berjumlah 123 unit kerja. Oleh karena itu perlu dilakukan perluasan fokus penelitian lebih lanjut dengan data mikro untuk mengetahui determinan faktor lainnya yang mempengaruhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Adapun 123 kantor cabang induk terbagi berdasarkan tiga kategori yaitu kantor cabang utama, kantor cabang madya dan kantor cabang pratama. Hal ini mendorong koefisien R Squared saat dilakukan penelitian subsampel kategori kelas cabang bernilai kecil. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan lebih spesifik dengan menyertakan juga data berdasarkan kategori kantor cabang perintis yang berjumlah sebanyak 203 unit yang disertai juga variabel lainnya guna mendukung hasil yang lebih spesifik untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor formal pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto dan Fedryansyah. (2018). Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dalam Menghadapi ASEAN Economy Community. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. ISSN: 2630-3367 Volume 1 No.2 77-86
- Agustiono, Rendy. (2020). Respon Kebijakan Jaminan Sosial Terhadap Munculnya Gig Ekonomi dan Strategi untuk Perlindungan Pekerja Gig Ekonomi: Studi Komparasi di Indonesia dan Australia. *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan* Vol. 5 No.1.
- Ariefianto, M.D. (2012). *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Augustin, Eldest. (2017). Behaviour of Saving for Old Age For Workers in Indonesia and the United Kingdom. *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan* Vol 2 No.1.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2020). Sejarah. Retrieved November 1, 2020, from <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html>
- BPJS Ketenagakerjaan. (2020). Sejarah. Retrieved November 1, 2020, from <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jaminan-kecelakaan-kerja.html>
- BPJS Ketenagakerjaan. (2020). Sejarah. Retrieved November 1, 2020, from <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jaminan-kematian.html>
- BPJS Ketenagakerjaan. (2020). Sejarah. Retrieved November 1, 2020, from <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jaminan-hari-tua.html>
- BPJS Ketenagakerjaan. (2020). Sejarah. Retrieved November 1, 2020, from <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jaminan-pensiun.html>
- BPJS Ketenagakerjaan. (2020). Sejarah. Retrieved November 1, 2020, from <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html>
- BPJS Ketenagakerjaan. (2020). Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2020 tentang pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pemberi kerja dalam hal ini perusahaan dalam mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jakarta
- Damodar N. Gujarati. (2007). *Dasar-dasar ekonometrika*. Erlangga, Jakarta.
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, & Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta.
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, & Presiden Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta.
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, & Presiden Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta.

- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, & Presiden Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Jakarta.
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, & Presiden Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Jakarta.
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, & Presiden Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Jakarta.
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, & Presiden Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Jakarta.
- Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan Direksi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Pemberi Kerja Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Giambiagi, F & Mello, L.D. (2006). Social Security reform in Brazil: Achievements and Remaining Challenges. OECD Economics Department Working Papers.
- Gultom, Ratih Yasnuami. (2016). Pengaruh Perkembangan Makro Indonesia Terhadap Pertumbuhan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan* Vol.1.
- Gultom, Yohanna M.L. (2019). Transaction Costs and Efficiency in Design-Build Contracting: Empirical Evidence from the Transportation Infrastructure Sector in Oregon. ISSN:1530-9576
- Haris, Muhammad. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Denda Piutang Iuran BPJS Ketenagakerjaan Yang Tidak Dibayar Oleh Perusahaan Yang Terdaftar (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Medan: Universitas Sumatera Utara
- Hayashi, M. (2010). Social Protection in Japan: Current State and Challenges. ERIA Research Project Report No.9
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2020). Tenaga Kerja. Retrieved November 1, 2020, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tenaga%20kerja>
- Mandigma, Ma. Belinda. (2016) Determinants of Social Insurance Coverage in the Philippines. *International Journal of Social Science and Humanity*, 660-666
- Mankiw, N.G. (2006). Makroekonomi (Edisi 6). Jakarta: Penerbit Erlangga
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- Nainggolan, Franataldo, K. (2020). Perkembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Platform Digital: Antara Peluang Kerja dan Kerentanan. *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan* Vol. 5 No.1.
- Panggabean, Freadi. (2019). Model Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia: Dinamika Pertumbuhan Cakupan Kepesertaan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pindyck, Robert dan Rubinfeld, Daniel. (2013). *Microeconomics* Eight Edition. New York : Pearson Education, Inc.
- Rickne, Johanna. (2013). Labor Market Conditions and Social Insurance in China. *China Economic Review* : 52-68
- Sujamto. (1983). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sulastomo. (2011). *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Suratman, S., & Junaidi, M. (2019). Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Jurnal USM Law e-ISSN: 2621-4105* Vol 2 No. 1.
- Thariq, M., dkk.(2020). Pelaksanaan Pengawasan Asuransi Jiwasraya Oleh OJK Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. ISSN: 2086-1702 Vol. 12 No.1.
- Tjiptoherijanto, P. (2000). Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi.

- Purwoko, H, D. (2014). Sistem Jaminan Sosial Di Malaysia: Suatu Tata Kelola Penyelenggaraan Per Program Yang Berbasis Pada Pelembagaan Yang Terpisah. *E-Journal Widya Ekonomika* ISSN 2338-7807 Vol.1 No.1.
- Rao, M.P. (2005). Social Security Administration in India – Study of Provident Funds and Pension Scheme. MPRA University of Munich No.1919.
- Saefuloh, A.A., dkk. (2015). Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* Vol.6 No.1.
- Sulastiko, Putri.P. (2020). Perkembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Platform Digital: Antara Peluang Kerja dan Kerentanan. *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan* Vol. 5 No.1.
- Wulandari, Dwi., dkk. (2020) The Relationship Between Economic Growth and Macroeconomic Indicators in Indonesia. *Journal of International Studies*, Vol.13 No.2, 139-148.